

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, tanggung jawab terhadap masyarakat dan pihak terkait mengenai kinerja sektor publik menjadi semakin umum. Peningkatan tuntutan tersebut mendorong lembaga sektor publik untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas dan kinerjanya kepada publik. (Adhillah, 2022). Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem teknis dan analisis akuntansi yang digunakan dalam manajemen dana masyarakat di berbagai instansi pemerintah tingkat nasional dan departemen yang bersangkutan seperti pemerintah daerah, perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan daerah (BUMD), organisasi nirlaba (LSM), serta yayasan sosial, termasuk dalam proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta (Bastian, 2019).

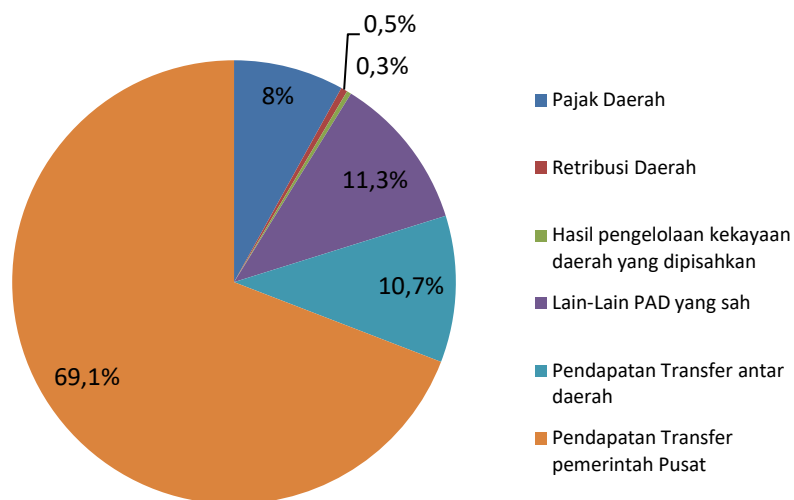
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan terstruktur. Di era reformasi ini, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam mewujudkan cita-cita negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat berperan sebagai penyedia informasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat, seperti hak untuk mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk menyampaikan aspirasi (Adhillah, 2022).

Pemerintah pusat dan daerah, sama-sama membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada publik, serta memberikan informasi lain yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sosial, politik dan ekonomi (Akhmad et al., 2018). Pemerintah sebagai lembaga *pure non-profit* juga tidak lepas dari tanggung jawab dan tuntutan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah-satu badan pendukung pemerintah daerah, terutama dalam hal keuangan. BKAD bertugas membantu Bupati dalam menjalankan beberapa fungsi yang mendukung administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab daerah, serta menjalankan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah (BKAD, 2021). Tata kelola keuangan daerah harus dilakukan dengan keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas guna mencapai pemerintahan yang bersih. Karena laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah untuk masa depan (Oktafia, 2023).

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BKAD Kabupaten Cirebon, untuk mampu mengelola keuangan dan asset daerah, yang sesuai dengan Misi Bupati yaitu Misi ke 4 (empat) "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah". Salah-satu sasaran strategis yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yaitu meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.. Indikator sasaran ini yaitu peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai SAP serta penyajian laporan aset tetap yang diyakini kewajarannya (Bkad Kabupaten Cirebon, 2023).

Gambar 1
Presentase Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon



(Sumber : <http://bkad.cirebonkab.go.id>.)

Sebagian besar pendapatan Pemerintah Kabupaten Cirebon berasal dari pemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan laporan pertanggung jawaban dari pemerintah daerah berupa laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 dan pasal 32 mengenai Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni). Laporan keuangan tersebut setidaknya mencakup Neraca, Laporan Aus Kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang penyajiannya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus dijadikan referensi dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang keuangan negara, yang menetapkan format dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memberikan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK memberikan empat opini yang meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW).

Tabel 1. 1
Perkembangan LKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon

Tahun Anggaran	Opini Bpk
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Sumber : <http://bkad.cirebonkab.go.id>,)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran (TA) 2015-2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walau sudah 8 kali berturut-turut mendapat opini WTP, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih mendapat catatan atau temuan dari BPK. Sehingga dari temuan BPK tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam pengembangan kinerja yang lebih baik lagi. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 menemukan adanya Kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, kelebihan pembayaran pada pekerjaan irigasi, jalan dan jaringan, pengelolaan persediaan yang belum sesuai, serta pengelolaan aset tetap yang belum memadai (LHP BPK-RI , 2022)

Salah-satu hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas adalah kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi. Menurut (Ariesta, 2013) Dalam menciptakan informasi yang berharga, terdapat dua unsur pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Sumber daya manusia yang berkualitas juga mampu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan karena memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang tugas dan bidangnya, sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.

Ketua komisi II DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat LKPJ tahun 2022 bersama jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa pihaknya juga merekomendasikan agar sumber daya manusia di BKAD ditingkatkan. Khususnya tenaga ahli keuangan. Agar lebih profesional. Karena BKAD merupakan ruhnya Kabupaten Cirebon (Basori Hasan, 2023)

Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi salah satu faktor yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam pelaksanaan tugasnya (Fadhil, 2016). Menurut (Mangkunegara, 2012), Kompetensi sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian individu yang secara langsung memengaruhi kinerjanya. Sedangkan Menurut (Sudarmanto, 2015), Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

Organisasi pemerintah daerah tentunya memerlukan pegawai yang berkompeten. Pegawai bagian keuangan di dinas-dinas daerah harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan metode dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah. Seseorang belum dapat dianggap memahami penyusunan laporan keuangan tanpa pemahaman yang cukup dalam bidang akuntansi. Pengetahuan dan keterampilan dalam

bidang akuntansi sangat penting untuk dapat mengelola informasi keuangan dengan baik (Ariyanto, 2020). Dengan demikian, kemampuan yang unggul dalam akuntansi menjadi sangat esensial bagi pegawai di departemen keuangan untuk mengelola dan menghadirkan informasi keuangan dengan baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Laporan Keuangan merupakan hasil dari praktik akuntansi, sehingga untuk menghasilkannya diperlukan individu yang memiliki keahlian yang memadai dalam bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia menjadi krusial karena laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dalam konteks ini, kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian entitas yang bersangkutan (Maulana, 2017).

Dalam lingkungan pemerintahan, Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah mematuhi standar akuntansi yang berlaku, dan kemampuan akuntan yang handal (Suratman et al., 2022). Akuntansi sektor publik diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan memiliki kualitas dan keakuratan dalam menyampaikan informasi, hal itu akan menciptakan kepercayaan pembaca terhadap informasi tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, meringkas transaksi dan peristiwa keuangan, serta menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah dijelaskan sebagai serangkaian prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang disusun secara sistematis untuk menjalankan fungsi akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan, dalam lingkup organisasi pemerintah.

Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ketentuan dan fondasi yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut (Rusmana, 2017) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, baik secara teoretis maupun praktis untuk mencatat, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Badan/Lembaga yang berwenang untuk menyusun standar dan selanjutnya dimodifikasi menjadi Standar. Menurut (Bastian, 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aturan-aturan akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menampilkan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah Nomor 01 tahun 2020 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa Laporan keuangan adalah rangkaian informasi yang terorganisir tentang keadaan keuangan dan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban entitas pelapor terhadap pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya.

Banyak pihak bergantung pada informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut haruslah bermakna dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus memiliki kualitas yang baik (Admaja & Wahyundaru, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Ciri laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada beberapa tingkatan dalam penilaian laporan keuangan yang diberikan oleh BPK dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Selain opini dari BPK, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah juga dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi didalamnya tidak menyimpang dari undang-undang, dan disajikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pujanira, 2017).

Menurut (Tjiptono, 2004) kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi . Menurut (Fahmi, 2013) laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang terorganisir mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas laporan keuangan dibentuk oleh kriteria dan unsur-unsur seperti andal, dapat dibandingkan, relevan dan dapat dipahami. Laporan keuangan dianggap relevan jika informasinya mampu memberikan pengaruh terhadap keputusan pengguna dengan membantu mempertimbangkan peristiwa dari masa lalu hingga masa depan. Laporan keuangan yang andal terwujud ketika laporan keuangan bebas dari kesalahan material serta penyajian yang menyesatkan, menyajikan fakta dengan jujur dan dapat dikonfirmasi kebenarannya. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dapat dimengerti oleh pengguna.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi dengan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dan beberapa website pemerintahan seperti website BKAD Kabupaten Cirebon, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, dan beberapa website pendukung, terkait kualitas penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa penyajian laporan

keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon belum optimal. Lebih rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2
Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021

Pokok-Pokok Kelemahan	Keterangan
Kesalahan penganggaran atas Belanja Pegawai pada RSUD Arjawinangun sebesar Rp54.351.820.209	Ketidaksesuaian dengan Peraturan pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lmapiran II.03 Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 2 Laporan Realisasi Anggaran
Volume Enam Paker Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp558.162.634,72 (kelebihan pembayaran sebesar Rp547.413.231,88 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp10.749.402,84) dan Denda keterlambatan belum Disetor Sebesar Rp92.624.070,00	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penilaian persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku	Ketidaksesuaian dengan PSAP No 5 Tentang Akuntansi Persediaan
Pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memadai	Ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah

(Sumber : jabar-ppid.bpk.go.id)

Melihat fenomena diatas mengenai adanya beberapa ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu faktornya yaitu kemampuan para penata keuangan dalam bidang

akuntansi. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh kedua unsur tersebut yakni kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari penjelasan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah diantaranya :

1. Belum optimalnya pengelolaan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon
2. Belum optimalnya penilaian persediaan karena tidak sesuai dengan standar akuntansi
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pada bidang akuntansi yang menyebabkan belum optimalnya penyajian laporan keuangan yang berkualitas
4. Adanya kesalahan penganggaran atas belanja pegawai
5. Adanya kelebihan pembayaran pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang
6. Adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan catatan kelemahan

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi fokus masalah pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon untuk mencegah penyebaran masalah.

D. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis.

Memperluas pengetahuan penulis mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan penyajian laporan keuangan sektor publik. Dengan adanya penelitian ini juga meningkatkan kemampuan berpikir serta menyelesaikan masalah, sehingga bermanfaat untuk masa depan.

2. Bagi Praktisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi baru yang bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah khususnya untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian serupa maupun bagi akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

4. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk memutuskan masalah dalam penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan. Pembahasan mengenai

Literatur review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan.

BAB V PENUTUP, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dan dideskripsi.

